**Review Jurnal Restrukturisasi Birokrasi Dan Pengembangan Good Govermance (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi Dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang)**

|  |  |
| --- | --- |
| Judul  | Jurnal Restrukturisasi Birokrasi Dan Pengembangan Good Govermance (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi Dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang) |
| Jurnal  | Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi |
| Volume dan Halaman | Volume.1 No.1, article 4 |
| Tahun | 2014 |
| Penulis  | Mouzar Agustamar |
| Reviewer | Nunung Sri Rahayu |
| Tanggal  | 29 April 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan Penelitian | Mendiskripsikan implementasi *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004* Tentang Pemerintahan Daerah dan *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004* Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta *Peraturan Pemerintah Nomor 41* *Tahun 2007* tentang Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Tanjung Pinang. |
| Subjek Penelitian | Perangkat Daerah di KotaTanjung Pinang |
| Metode Penelitian | Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini berusaha untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya aktual pada saat dilakukannya penelitian dengan cara mengklasifikasikan data, menganalisis data, dan kemudian menyimpulkan, sehingga diperoleh jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta untuk membuat deskripsi, atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. |
| Hasil penelitian | Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang pada Dinas-Dinas Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No 3 tahun 2012, Perda Nomor 11 Tahun 2012 dan Perda No. 14 Tahun 2012 dari segi kuantitas eselonisasi kurang berjalan sesuai dengan prinsip efesiensi, efektif dan rasional pada peraturan pemerintah no 41 tahun 2007. Proses restrukturisasi organisasi Pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah yang telah disebutkan di atas dan dibentuk berdasarkan petunjuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Sehingga terdeskripsi bahwa Walikota dibantu 12 Dinas, 12 Lembaga Teknis daerah dan 3 kantor Kecamatan. |
| kekuatan penelitian  | Banyak melibatkan unsur birokrasi dan melakukan evaluasi terus menerus sehingga data yang diperoleh kuat. |
| kelebihan penelitian  | Menggunakan durasi waktu yang cukup lama karena banyak melibatkan unsur birokrasi. |
| Saran  | - Pemerintah Kota Tanjung Pinang perlu melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat.- Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang perlu mengkaji kembali pembentukan unit organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang keempatnya merupakan hal yang ingin dicapai oleh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.- Dalam rangka menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka proses restrukturisasi di Jajaran Birokrasi Pemerintah Daerah perlu memperhatikan prinsip Miskin Struktur Kaya Fungsi sehingga perlu dilakukan *regrouping*/penyatuan atau penghapusan terhadap lembaga–lembaga yang telah ada dan dianggap menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana APBD untuk keperluan birokrasi. Untuk mewujudkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat maka semua jajaran organisasi birokrasi yang ada perlu melakukan perbaikan dan beberapa reorientasi sesuai dengan unsur-unsur *good governance*. |